

ABSTRAK

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang kaya akan bahantambang, terutama bahantambang Galian Golongan C. Bahan-bahantambang tersebut sangat potensial untuk diusahakan. Namun demikian, pengusaha bahan-bahantambang tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang merugikan kehidupan masyarakat luas. Tumpang tindihnya peraturan dan undang-undang dengan pihak-pihak yang berkepentingannya yaitu para pengusaha pertambangan dengan pemerintah serta dengan para masyarakat sekitar wilayah pertambangan sehingga mengakibatkan maraknya kegiatan penambangan ilegal yang merusak alam dan berdampak negatif yang sangat banyak. Konflik kepentingan di sini menjadikan salah satu penyebab utama masalahnya yaitu pertambangan liar, banyak sengketa terjadi dan kerusakan alam yang belum tertangani hingga sekarang. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis empiris, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini merupakan tinjauan yuridis sosiologis. Proses pengelolaan galian golongan C oleh pemerintah Kabupaten Boyolali tidak melalui tahapan perencanaan karena usaha tersebut merupakan usaha runtumurun dan dikelola oleh perorangan. Upaya pengendalian dan pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali dengan menerapkan Perda No. 10 Tahun 2011 instrumen-instrumen lingkungan hidup walaupun dalam pelaksanaannya belum dapat memperlihatkan hasil yang maksimal. Kurangnya tenaga pembinaan dan pengawasan mengakibatkan upaya pengawasan yang dilakukan tidak dapat secara rutin dijalankan, akibatnya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik dalam proses perizinan, pelaksanaan usaha, dan juga dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan penerapan instrumen administratif, instrumen perdata dan juga instrumen pidana tetapi dalam mengatasi sengketa lingkungan hidup dan juga pertambangan lebih banyak dilakukan penyelesaian di luar pengadilan yaitu melalui negosiasi dan mediasi. Ada beberapa faktor pendorong yang menjadikan penyebab suburnya kegiatan tambang ilegal, mulai dari faktor ekonomi hingga masalah menghindarkan kewajiban bagi pengusaha pertambangan maupun pihak pemerintah dan penegak hukum. Sehingga pada akhirnya menghasilkan dampak yang buruk pada lingkungan alam & sosial.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis Sosiologis, Perda No. 10 Tahun 2011, Pertambangan Galian C, Kabupaten Boyolali, Dampak negatif.

ABSTRACT

Boyolali Regency is an area that is rich in mining materials, especially Galian Golongan C mining materials. These mining materials are very potential to be cultivated. However, the exploitation of mining materials has the potential to cause damage to the environment which is detrimental to the lives of the wider community. Overlapping regulations and legislation with interested parties, namely mining entrepreneurs with the government and with communities around the mining area resulting in rampant illegal mining activities that destroy nature and have a lot of negative impacts. The conflict of interest here is one of the main causes of the spread of illegal mining, many disputes occur and natural damage that has not been handled until now. The research method used by the author in this study is to use a qualitative approach that is empirical juridical, so this research is called sociological legal research. The results of this study are sociological juridical reviews. The process of managing group C excavation by the Boyolali Regency government does not go through the planning stage because the business is a hereditary business and managed by individuals. The control and maintenance efforts were carried out by the Boyolali Regency government by implementing Regulation No. 10 of 2011 on environmental instruments although in its implementation it has not been able to show maximum results. The lack of guidance and supervision personnel has resulted in the supervision efforts being carried out unable to be routinely carried out, as a result there are still many violations that occur both in the licensing process, business implementation, and also in law enforcement. Law enforcement is carried out by implementing administrative instruments, civil instruments as well as criminal instruments, but in overcoming environmental disputes and mining, more settlement is done outside the court, namely through negotiation and mediation. There are several driving factors that are the cause of the proliferation of illegal mining activities, ranging from economic factors to problems avoiding obligations for mining businessmen and the government and law enforcement. So that it ultimately produces a bad impact on the natural & social environment.

Keywords: Sociological Juridical Review, Regional Regulation No.10 of 2011, Mining Type C, Boyolali Regency, Negative Impact.